

PUBLICIO JURNAL ILMIAH POLITIK, KEBIJAKAN DAN SOSIAL

E-ISSN : 2656-0305

DOI : <https://doi.org/10.51747/x6q32728>

POLITIK GULA MERAH

Rizca Yunike Putri¹

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Wijaya Kusuma¹

rizca.yurike@uwks.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini mencoba melakukan riset pengembangan kapasitas UKM pada pemerintah daerah yang baik pada klaster ekonomi gula merah di Jawa Timur, khususnya di industri gula merah Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Latar belakang pengembangan kapasitas UKM dalam kasus pemerintah daerah yang baik klaster ekonomi akan dapat meningkatkan kapasitas bisnis ekonomi jika dilakukan secara sinergis dan tidak hanya mendukung pengembangan daerah yang memiliki bisnis serupa, tetapi juga sinergi dalam upaya kelembagaan untuk bekerja bersama untuk bersama-sama menghadapi dan memecahkan masalah yang dihadapi oleh bisnis ekonomi di kawasan bisnis ekonomi tertentu. Koperasi dianggap sebagai solusi bagi koperasi, masalah-masalah perusahaan ekonomi yang tadinya dihadapi sendiri atau dalam kelompok kecil akan mudah jika dihadapi dan dipecahkan bersama dalam bentuk perusahaan ekonomi koperasi yang secara bersama-sama didirikan oleh pengusaha kecil di klaster ekonomi UKM gula merah. Sebagai studi eksplorasi dengan pendekatan kualitatif yang berguna untuk menjelaskan hubungan timbal balik, mengatur perubahan, membandingkannya, dan menilai efektivitas suatu kebijakan atau program. Output dari penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan kapasitas penelitian UKM. Hasil yang diperoleh dianalisis menggunakan metode kualitatif untuk memperoleh gambaran potensi pembentukan koperasi untuk pengembangan kapasitas kelembagaan (capacity building) koperasi berbasis ekonomi klaster di Jawa Timur, terutama pada klaster ekonomi gula merah dan kemudian dijadikan rekomendasi kebijakan sebagai upaya untuk pemberdayaan UKM gula merah melalui pengembangan lembaga koperasi.

Keywords: gula merah, implementasi, kebijakan, klaster UKM, pembangunan sosial

1. PENDAHULUAN

Pengembangan UKM dan koperasi di Indonesia, setidaknya bisa menilai dari kebijakan pengembangan empat level. Kebijakan pengembangan UKM dan koperasi dapat dibagi menjadi empat level, yaitu level meta, level makro, level meso dan level mikro. Pada level meta, kemauan politik para pendiri republik ini telah mendukung landasan Undang-Undang yang jelas dan tegas bagi koperasi, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 33 UUD 1945 dan penjelasannya, lebih lanjut diperkuat oleh Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Koperasi (1), dan Undang-Undang No. 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil

(2). Pengembangan kapasitas UKM di pemerintahan daerah yang baik dalam hal klaster ekonomi dapat meningkatkan kapasitas kegiatan ekonomi jika bersinergi mendukung pengembangan daerah (3).

Koperasi dianggap sebagai solusi bersama yang didirikan oleh para pengusaha kecil di kluster ekonomi UKM gula merah. Studi terhadap kluster UKM di Eropa Barat, setidaknya menunjukkan bahwa ada sejumlah faktor (4), yang membuat mereka mampu berkembang baik, antara lain: (1) Di pusat juga ada pemasok bahan baku, peralatan produksi, mesin, dan komponen, sub-kontraktor, dan produsen barang jadi. Selain mengurangi biaya produksi, bekerja dalam sinergi satu sama lain, memfasilitasi hubungan bisnis di antara mereka; (2) adanya kombinasi kompetisi yang ketat di satu sisi, dan kerjasama yang baik di sisi lain, di antara sesama UKM. Dengan demikian menciptakan tingkat efisiensi kolektif (efisiensi kolektif) tinggi; (3) Dalam kelompok ini, ada pusat layanan, terutama yang disediakan oleh pemerintah daerah, yang dapat digunakan secara kolektif oleh semua pengusaha yang ada di sana; (4) UKM di kluster menjadi sangat fleksibel dalam menghadapi perubahan di pasar, di mana ia telah menciptakan jaringan yang baik, dan inovasi cerdas.(5)

Berdasarkan catatan berbagai lembaga yang disusun Tim Studi JICA (2002), saat ini setidaknya terdapat 9.800 unit pusat UKM dengan tingkat pengembangan tingkat keterkaitan dalam gugusan yang umumnya masih rendah.(6) Jumlah unit UKM yang diamati di pusat sebagai kelompok embrionik diperkirakan sekitar 475.000. dilihat dari distribusi sekitar 58% yang terpusat di wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.

Dalam penelitian ini digunakan perspektif pengembangan kelembagaan atau yang biasa dikenal dengan pengembangan kapasitas kelembagaan (capacity building). Namun tetap memperhatikan berbagai aspek yang mempengaruhi pengembangan UMKM seperti kapasitas modal usaha, kapasitas manajer sumber daya manusia, kapasitas manajemen bisnis, kapasitas jaringan dan pemasaran bahan baku serta faktor eksternal seperti iklim bisnis dan dukungan kebijakan pemerintah.(7)

Kebijakan pada level makro akan menentukan apakah sistem yang dijalankan kondusif dan mendukung kondisi ekonomi linear dengan pengembangan UKM dan koperasi. Kebijakan di tingkat makro akan menentukan struktur dan tingkat persaingan pasar yang dihadapi oleh pengusaha termasuk UKM dan koperasi.(8) Tugas pemerintah (pusat dan daerah) untuk menumbuhkan iklim usaha yang kondusif bagi UKM dan koperasi, dalam arti UKM dan koperasi telah berupaya membuka peluang dan beban yang sama dibandingkan dengan usaha lain secara proporsional.(9)

Prioritas mendesak untuk pendekatan pemerintah Indonesia dalam pengembangan UKM dan koperasi adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi sektor swasta untuk bergerak dan tumbuh. Dengan demikian, perlu untuk mereformasi lingkungan otoritas formal di mana perusahaan beroperasi, kebijakan terkait bisnis dan peraturan yang sesuai. Dalam konteks pengembangan UKM dan koperasi, tantangan utama bagi pemerintah mana pun, termasuk pemerintah Indonesia, adalah untuk menentukan apa perannya dalam mengembangkan pasar bagi UKM dan koperasi secara efektif.(10)

Hasil langsung terlihat dari rendahnya tingkat teknologi dan struktur pekerjaan, seperti yang ditunjukkan oleh keragaman nilai tambah klaster UKM yang hanya mencapai Rp 1 miliar atau lebih rendah dari industri dalam negeri yaitu 1,2 miliar. Sementara industri kecil di luar klaster mencapai 2,9 miliar atau 2 kali lebih besar. Produktivitas yang rendah dari klaster ini juga terjadi di semua sektor ekonomi. Dengan demikian kondisi klaster yang ada secara umum dapat diklasifikasikan menjadi tiga tahap pengembangan sesuai dengan produktivitas tenaga kerja dan penggunaan teknologi adalah teknologi yang memiliki produktivitas rendah/upah minimum tenaga kerja (UMR) Rp970.000. UMR di tingkat

teknologi menengah Rp2,055 juta, serta teknologi tinggi Rp8,24 juta.

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah: "Bagaimana pengembangan peningkatan kapasitas UKM di pemerintah daerah yang baik dalam kasus kluster ekonomi gula merah di Jawa Timur?" Penelitian ini berguna untuk menyusun strategi dan konsep kapasitas pengembangan Rekomendasi kebijakan UKM di pemerintah daerah yang baik tentang kelompok ekonomi gula merah di Jawa Timur.

METODE PENELITIAN Berdasarkan bentuk masalah, ruang lingkup dan tujuan penelitian, penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai penelitian eksploratif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian eksploratif, adalah salah satu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menguji sesuatu (minat) tidak diketahui, tidak mampu dipahami, atau tidak dikenali dan/namun bermanfaat untuk menjelaskan keterkaitan, menetapkan perubahan keputusan ke masa depan, membandingkan kondisi, dan menilai efektivitas kebijakan/program. Kegiatan ini dilakukan pada pengembangan kapasitas penelitian UKM di pemerintah daerah yang baik pada kluster ekonomi gula merah di Jawa Timur terkait dengan kluster industri gula merah di Kediri, tepatnya di Kecamatan Ngadiluwih dan Kandat. Data dikumpulkan dengan cara dokumentasi, observasi dan wawancara. Dalam studi ini, data primer diperoleh melalui serangkaian wawancara baik dengan pejabat, informan kunci, dan pengusaha informan yang melakukan wawancara mendalam dengan penanya perangkat Anda dan FGD terbatas yang dilakukan langsung di lokasi usaha koperasi dijalankan. Hasil yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif untuk memperoleh gambaran potensi pembentukan koperasi untuk pengembangan kapasitas kelembagaan (capacity building) koperasi berbasis ekonomi kluster di Jawa Timur, terutama pada kluster ekonomi gula merah dan kemudian melayani rekomendasi kebijakan sebagai upaya untuk memberdayakan UKM gula merah melalui pengembangan lembaga koperasi. Validitas data adalah kegiatan yang dilakukan sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan di semua bidang.

2. METODE

Berdasarkan bentuk masalah, ruang lingkup dan tujuan penelitian, penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai penelitian eksploratif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian eksploratif, adalah salah satu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menguji sesuatu (minat) tidak diketahui, tidak mampu dipahami, atau tidak dikenali dan/namun bermanfaat untuk menjelaskan keterkaitan, menetapkan perubahan keputusan ke masa depan, membandingkan kondisi, dan menilai efektivitas kebijakan/program. Kegiatan ini dilakukan pada pengembangan kapasitas penelitian UKM di pemerintah daerah yang baik pada kluster ekonomi gula merah di Jawa Timur terkait dengan kluster industri gula merah di Kediri, tepatnya di Kecamatan Ngadiluwih dan Kandat. Data dikumpulkan dengan cara dokumentasi, observasi dan wawancara. Dalam studi ini, data primer diperoleh melalui serangkaian wawancara baik dengan pejabat, informan kunci, dan pengusaha informan yang melakukan wawancara mendalam dengan penanya perangkat Anda dan FGD terbatas yang dilakukan langsung di lokasi usaha koperasi dijalankan. Hasil yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif untuk memperoleh gambaran potensi pembentukan koperasi untuk pengembangan kapasitas kelembagaan (capacity building) koperasi berbasis ekonomi kluster di Jawa Timur, terutama pada kluster ekonomi gula merah dan kemudian melayani rekomendasi kebijakan sebagai upaya untuk memberdayakan UKM gula merah melalui pengembangan lembaga koperasi. Validitas data adalah kegiatan yang dilakukan sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan di semua bidang.

3. TINJAUAN LITERATUR

Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan salah satu strategi utama dalam meningkatkan daya saing ekonomi nasional, mengurangi kemiskinan, serta menciptakan lapangan kerja. Di Indonesia, UKM memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap perekonomian nasional, baik dari sisi penyerapan tenaga kerja maupun pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB). Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa daya saing UKM masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan modal, rendahnya kualitas sumber daya manusia, lemahnya kapasitas manajerial, terbatasnya akses terhadap teknologi, serta rendahnya kemampuan membangun jejaring usaha (networking) (Tambunan, 2009; Tambunan, 2019). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pengembangan yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan kapasitas individu pelaku usaha, tetapi juga memperkuat ekosistem usaha melalui kerja sama antarpelaku ekonomi.

Salah satu pendekatan yang banyak digunakan dalam pengembangan UKM adalah pendekatan klaster (cluster approach). Porter (1998) mendefinisikan klaster sebagai konsentrasi geografis perusahaan, pemasok, industri pendukung, lembaga pendidikan, lembaga penelitian, serta institusi pemerintah yang saling berhubungan dan bekerja sama dalam suatu sektor ekonomi tertentu. Keberadaan klaster memungkinkan terjadinya peningkatan efisiensi, inovasi, serta daya saing melalui interaksi yang intensif di antara para pelaku usaha. Dalam perspektif Porter (1998), daya saing suatu wilayah tidak hanya ditentukan oleh kemampuan masing-masing perusahaan, tetapi juga oleh kualitas hubungan antarlembaga yang membentuk suatu sistem produksi.

Konsep klaster sebenarnya telah berkembang sejak Marshall (1920) memperkenalkan teori industrial districts. Marshall menjelaskan bahwa konsentrasi geografis industri menghasilkan keuntungan eksternal (external economies) berupa tersedianya tenaga kerja yang memiliki keterampilan khusus, kemudahan memperoleh bahan baku, serta penyebaran pengetahuan (knowledge spillover) yang mempercepat inovasi. Menurut Marshall (1920), perusahaan-perusahaan kecil akan memperoleh manfaat yang sama seperti perusahaan besar apabila berada dalam suatu kawasan industri yang memiliki jaringan produksi yang kuat. Konsep tersebut kemudian menjadi dasar bagi berbagai model pengembangan klaster di berbagai negara.

Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa pendekatan klaster mampu meningkatkan daya saing industri kecil dan koperasi. Di Italia, pengembangan industrial districts berhasil meningkatkan produktivitas usaha kecil melalui spesialisasi produksi dan kerja sama antarpelaku usaha (Becattini, 1990). Demikian pula di India dan Chile, pendekatan klaster digunakan untuk meningkatkan efisiensi produksi, memperkuat akses pasar, serta meningkatkan kemampuan inovasi UKM (UNIDO, 2001). Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa daya saing industri tidak hanya ditentukan oleh modal ekonomi, tetapi juga oleh kualitas hubungan sosial dan kelembagaan yang berkembang dalam suatu wilayah.

Dalam konteks pengembangan klaster, Schmitz (1995) memperkenalkan konsep collective efficiency sebagai faktor utama yang membedakan keberhasilan suatu klaster dengan sekadar konsentrasi geografis industri. Collective efficiency merupakan keuntungan yang diperoleh pelaku usaha melalui kombinasi antara keuntungan eksternal (external economies) dan tindakan kolektif (joint action). Keuntungan eksternal meliputi rendahnya biaya transaksi, kemudahan memperoleh informasi pasar, akses terhadap teknologi, dan tersedianya tenaga kerja terampil. Sementara itu, tindakan kolektif diwujudkan melalui kerja sama antarpelaku usaha, koperasi, lembaga keuangan, pemerintah, maupun institusi pendukung lainnya. Semakin tinggi tingkat kolaborasi antarpelaku, semakin besar peluang klaster untuk berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang kompetitif.

Selain efisiensi kolektif, modal sosial (social capital) juga merupakan faktor penting dalam pengembangan kluster. Putnam (1993) menjelaskan bahwa modal sosial terdiri atas kepercayaan (trust), norma sosial, serta jejaring kerja sama yang memungkinkan masyarakat melakukan tindakan kolektif secara efektif. Dalam konteks koperasi dan UKM, modal sosial menjadi dasar terbentuknya kerja sama antarpelaku usaha dalam memperoleh bahan baku, berbagi informasi pasar, melakukan inovasi, hingga memperluas jaringan pemasaran. Fukuyama (1995) menambahkan bahwa tingkat kepercayaan yang tinggi dalam suatu masyarakat akan menurunkan biaya transaksi sehingga meningkatkan efisiensi kegiatan ekonomi. Dengan demikian, keberhasilan pengembangan koperasi tidak hanya ditentukan oleh kemampuan finansial, tetapi juga oleh kualitas hubungan sosial antaranggota.

Peran pemerintah juga menjadi faktor penting dalam pengembangan kluster UKM. Menurut Porter (1998), pemerintah berfungsi sebagai fasilitator yang menciptakan iklim usaha kondusif melalui penyediaan infrastruktur, regulasi, akses pembiayaan, pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan inovasi. Kebijakan pemerintah yang tepat akan memperkuat hubungan antara pelaku usaha dengan lembaga pendukung sehingga mempercepat perkembangan kluster. Sebaliknya, lemahnya koordinasi kebijakan, birokrasi yang kompleks, serta terbatasnya dukungan kelembagaan dapat menghambat pertumbuhan kluster meskipun potensi ekonomi wilayah sangat besar.

Dalam konteks Indonesia, koperasi merupakan salah satu instrumen utama dalam pemberdayaan UKM. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menegaskan bahwa koperasi berfungsi mengembangkan potensi ekonomi anggota, memperkuat perekonomian rakyat, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun berbagai penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar koperasi masih menghadapi persoalan kelembagaan berupa rendahnya kualitas manajemen, keterbatasan modal, rendahnya partisipasi anggota, serta lemahnya profesionalisme pengelolaan (Hanel, 2005; Suryana, 2014). Kondisi tersebut menyebabkan banyak koperasi belum mampu menjalankan fungsinya sebagai lembaga ekonomi yang mampu meningkatkan daya saing anggotanya.

Permasalahan tersebut juga ditemukan pada industri gula merah skala kecil di Kabupaten Kediri. Sebagian besar pengrajin masih mengelola usahanya secara tradisional dengan tingkat pendidikan yang relatif rendah, keterbatasan modal, lemahnya kemampuan manajerial, serta belum optimalnya kerja sama antarpelaku usaha. Selain itu, fluktuasi kualitas bahan baku, keterbatasan akses pasar, serta ketergantungan terhadap pedagang pengumpul menyebabkan posisi tawar pengrajin relatif lemah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan industri gula merah tidak hanya berkaitan dengan aspek produksi, tetapi juga menyangkut kelembagaan ekonomi yang belum berkembang secara optimal.

Pendekatan kluster berbasis koperasi menjadi alternatif strategi yang potensial untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut. Melalui pendekatan ini, koperasi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga simpan pinjam, tetapi juga sebagai pusat koordinasi produksi, pemasaran, pengadaan bahan baku, pengembangan teknologi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Integrasi berbagai aktivitas tersebut memungkinkan terciptanya efisiensi kolektif, peningkatan nilai tambah, dan penguatan posisi tawar pengrajin dalam rantai nilai industri gula merah.

Berdasarkan berbagai kajian terdahulu dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pengembangan kluster UKM sangat dipengaruhi oleh interaksi antara efisiensi kolektif, modal sosial, dan dukungan kebijakan pemerintah. Namun demikian, sebagian besar penelitian masih membahas faktor-faktor tersebut secara terpisah. Kajian mengenai integrasi pendekatan kluster dengan penguatan kelembagaan koperasi pada industri gula merah masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting karena berupaya mengembangkan model penguatan koperasi berbasis kluster yang mempertimbangkan aspek

efisiensi kolektif, modal sosial, serta dukungan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan daya saing industri gula merah skala UKM.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetur.

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus,

quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Donec odio elit, dictum in, hendrerit sit amet, egestas sed, leo. Praesent feugiat sapien aliquet odio. Integer vitae justo. Aliquam vestibulum fringilla lorem. Sed neque lectus, consectetur at, consectetur sed, eleifend ac, lectus. Nulla facilisi. Pellentesque eget lectus. Proin eu metus. Sed porttitor. In hac habitasse platea dictumst. Suspendisse eu lectus. Ut mi mi, lacinia sit amet, placerat et, mollis vitae, dui. Sed ante tellus, tristique ut, iaculis eu, malesuada ac, dui. Mauris nibh leo, facilisis non, adipiscing quis, ultrices a, dui.

Morbi luctus, wisi viverra faucibus pretium, nibh est placerat odio, nec commodo wisi enim eget quam. Quisque libero justo, consectetur a, feugiat vitae, porttitor eu, libero. Suspendisse sed mauris vitae elit sollicitudin malesuada. Maecenas ultricies eros sit amet ante. Ut venenatis velit. Maecenas sed mi eget dui varius euismod. Phasellus aliquet volutpat odio. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Pellentesque sit amet pede ac sem eleifend consectetur. Nullam elementum, urna vel imperdiet sodales, elit ipsum pharetra ligula, ac pretium ante justo a nulla. Curabitur tristique arcu eu metus. Vestibulum lectus. Proin mauris. Proin eu nunc eu urna hendrerit faucibus. Aliquam auctor, pede consequat laoreet varius, eros tellus scelerisque quam, pellentesque hendrerit ipsum dolor sed augue. Nulla nec lacus.

Suspendisse vitae elit. Aliquam arcu neque, ornare in, ullamcorper quis, commodo eu, libero. Fusce sagittis erat at erat tristique mollis. Maecenas sapien libero, molestie et, lobortis in, sodales eget, dui. Morbi ultrices rutrum lorem. Nam elementum ullamcorper leo. Morbi dui. Aliquam sagittis. Nunc placerat. Pellentesque tristique sodales est. Maecenas imperdiet lacinia velit. Cras non urna. Morbi eros pede, suscipit ac, varius vel, egestas non, eros. Praesent malesuada, diam id pretium elementum, eros sem dictum tortor, vel consectetur odio sem sed wisi.

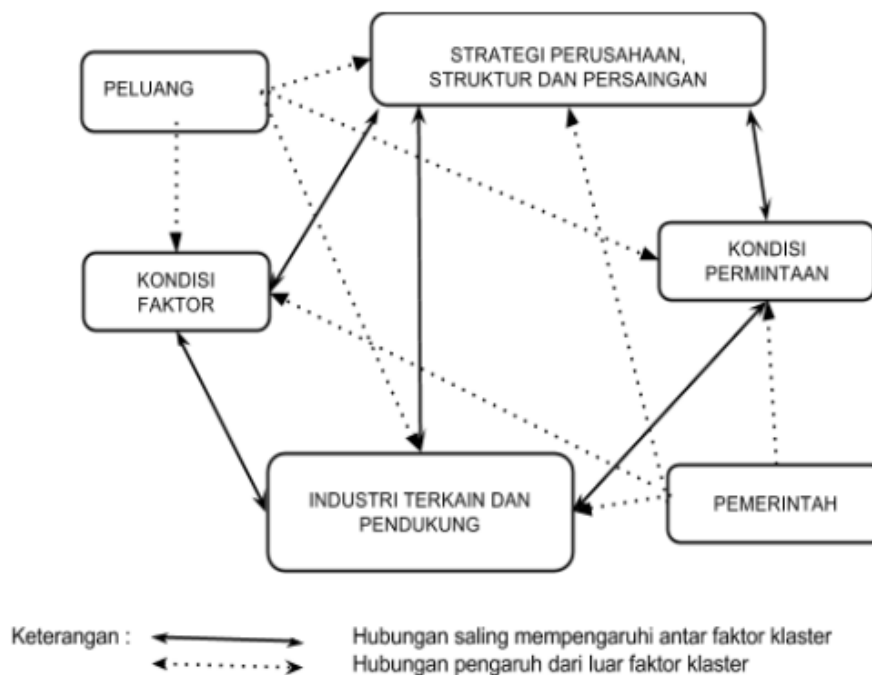
4.2. Pembahasan

4.3. Kebijakan Klaster Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) memiliki peran yang sangat strategis dalam perekonomian Indonesia. Hingga tahun 2011, jumlah UKM mencapai sekitar 52 juta unit usaha. Kontribusi sektor ini terhadap perekonomian nasional sangat signifikan, yaitu sekitar 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta mampu menyerap sekitar 97% dari total tenaga kerja nasional. Meskipun demikian, akses pelaku UKM terhadap lembaga keuangan formal masih relatif rendah. Dari keseluruhan pelaku UKM, hanya sekitar 25% atau sekitar 13 juta pelaku usaha yang memperoleh akses pembiayaan dari lembaga keuangan formal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan dan peningkatan akses pembiayaan masih menjadi tantangan utama dalam pengembangan UKM di Indonesia.

Pemerintah Indonesia terus berupaya mendorong pengembangan UKM melalui berbagai kebijakan yang dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, baik di tingkat pusat maupun pemerintah daerah. Salah satu instrumen yang digunakan adalah penguatan kelembagaan koperasi sebagai wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, khususnya Pasal 4, koperasi memiliki fungsi dan peran untuk mengembangkan potensi ekonomi anggota dan masyarakat,



Gambar 1: Model Diamond of Competitiveness (Porter, 1998)

meningkatkan kualitas kehidupan manusia, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan ekonomi nasional, serta mengembangkan kreativitas dan semangat berorganisasi masyarakat. Dengan demikian, koperasi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan sosial yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berbagai pengalaman internasional menunjukkan bahwa salah satu strategi efektif dalam meningkatkan daya saing koperasi dan UKM adalah melalui pendekatan kluster (*cluster approach*). Negara-negara seperti Italia, Chile, dan India telah berhasil memanfaatkan pendekatan ini untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing industri kecil. Kluster merupakan konsentrasi geografis perusahaan dan berbagai institusi yang saling berkaitan dalam suatu sektor ekonomi tertentu sehingga tercipta hubungan saling mendukung (*interconnectedness*) di antara para pelaku usaha.

Menurut Porter (1998), daya saing suatu kluster dipengaruhi oleh empat komponen utama yang dikenal sebagai *Diamond Model of Competitiveness*, yaitu: (1) kondisi faktor produksi (*factor conditions*), (2) kondisi permintaan (*demand conditions*), (3) strategi, struktur, dan persaingan perusahaan (*firm strategy, structure, and rivalry*), serta (4) industri pendukung dan industri terkait (*related and supporting industries*). Selain keempat komponen tersebut, Porter juga menambahkan dua faktor eksternal yang memengaruhi daya saing, yaitu peran pemerintah (*government*) dan faktor peluang (*chance*). Dalam perkembangan selanjutnya, beberapa peneliti menambahkan faktor sumber daya manusia sebagai elemen penting yang meliputi pekerja, birokrat, politisi, profesional, serta pengusaha.

Konsep kluster sendiri berakar pada teori aglomerasi industri yang dikemukakan oleh Marshall (1920). Marshall menjelaskan bahwa konsentrasi geografis industri mampu meningkatkan efisiensi dan daya saing melalui tiga mekanisme utama, yaitu: (1) tersedianya tenaga kerja yang memiliki spesialisasi sesuai kebutuhan industri; (2) kemudahan memperoleh bahan baku dan fasilitas pendukung produksi; serta (3) penyebaran pengetahuan (*knowledge spillover*) dan inovasi antarpelaku usaha.

Ketiga mekanisme tersebut menghasilkan eksternalitas positif (*positive externalities*) yang mendorong peningkatan produktivitas perusahaan maupun kawasan industri secara keseluruhan.

Karena efektivitas pendekatan klaster telah banyak dibuktikan dalam meningkatkan kinerja perusahaan, industri, maupun pembangunan wilayah, berbagai ahli kemudian mengembangkan model pengembangan klaster yang menitikberatkan pada faktor-faktor penentu keberhasilan suatu klaster industri. Pendekatan ini dinilai relevan untuk diterapkan pada pengembangan sentra UKM di Indonesia karena memiliki karakteristik yang relatif serupa dengan sentra industri kecil di Italia yang menjadi salah satu contoh keberhasilan implementasi klaster industri.

Model pengembangan klaster secara umum mengidentifikasi tiga faktor utama yang menentukan keberhasilan suatu klaster, yaitu efisiensi kolektif (*collective efficiency*), kebijakan pemerintah (*policy inducement*), dan modal sosial (*social capital*). Efisiensi kolektif mengacu pada keuntungan ekonomi yang diperoleh pelaku usaha karena berada dalam suatu kawasan industri yang sama. Keuntungan tersebut dapat berupa rendahnya biaya transaksi, kemudahan memperoleh informasi pasar, penyebaran teknologi, maupun peningkatan efisiensi produksi.

Selain manfaat pasif tersebut, efisiensi kolektif juga diwujudkan melalui tindakan kolektif (*collective action*), yaitu kerja sama antarpelaku usaha maupun antara produsen dengan pemasok, distributor, lembaga keuangan, pemerintah, dan berbagai institusi pendukung lainnya. Kolaborasi tersebut memungkinkan terbentuknya rantai nilai (*value chain*) yang lebih terintegrasi sehingga mampu meningkatkan daya saing industri secara keseluruhan.

Faktor kedua adalah kebijakan pemerintah sebagai bentuk stimulus pengembangan klaster. Keberhasilan suatu klaster tidak hanya bergantung pada motif ekonomi pelaku usaha, tetapi juga dipengaruhi oleh dukungan kebijakan pemerintah berupa penyediaan infrastruktur, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta regulasi yang kondusif bagi perkembangan industri.

4.3.1 Karakteristik Industri Gula Merah UKM dan Permasalahan Produksi

Sebagian besar industri gula merah merupakan usaha skala kecil yang dikelola secara tradisional dan padat karya. Dalam banyak kasus, koperasi dibentuk sebagai wadah untuk mengoordinasikan aktivitas ekonomi para pengrajin. Seluruh kegiatan koperasi dilaksanakan berdasarkan keputusan rapat anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi koperasi.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 22/PER/M.KUKM/IV/2007 tentang Pedoman Penilaian Koperasi, keberhasilan koperasi diukur berdasarkan tingkat partisipasi anggota dalam menjalankan kegiatan usaha koperasi. Oleh karena itu, keberhasilan koperasi sangat dipengaruhi oleh pemahaman anggota terhadap prinsip-prinsip perkoperasian.

Di Desa Slumbung, Kecamatan Ngadiluwih, dan beberapa desa di Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, sebagian besar pengrajin gula merah memiliki tingkat pendidikan formal hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP). Kondisi tersebut menyebabkan sebagian besar pengrajin belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai pengelolaan koperasi maupun prinsip-prinsip kelembagaan koperasi. Rendahnya literasi perkoperasian menjadi salah satu kendala dalam meningkatkan efektivitas koperasi sebagai lembaga ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan program pendidikan dan pendampingan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas anggota koperasi.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat tujuh permasalahan utama yang dihadapi industri gula merah di Kabupaten Kediri.

1. ketersediaan bahan baku. Produksi gula merah sangat bergantung pada kualitas tebu sebagai bahan baku utama. Kualitas gula yang dihasilkan dipengaruhi oleh mutu tebu, penanganan pascapanen, serta proses pengolahan
2. proses produksi. Tahapan penggilingan dan pemasakan masih dilakukan dengan teknologi sederhana sehingga produktivitas dan efisiensi produksi relatif rendah.
3. tenaga kerja. Sebagian besar tenaga kerja berasal dari masyarakat sekitar. Permasalahan utama berkaitan dengan produktivitas tenaga kerja serta hubungan kerja antara pemilik usaha dan pekerja.
4. pemasaran. Sebagian besar pengrajin masih memasarkan produknya secara individual sehingga memiliki posisi tawar yang rendah terhadap pedagang pengumpul maupun pedagang besar.
5. permodalan. Kebutuhan modal usaha dipenuhi melalui modal sendiri maupun pinjaman dari pedagang besar. Kondisi ini menyebabkan ketergantungan terhadap tengkulak masih cukup tinggi.
6. kesenjangan sosial. Menurut Kepala Desa Slumbung, berkembangnya industri gula merah belum sepenuhnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata sehingga masih terjadi kesenjangan antara pemilik industri dengan masyarakat sekitar
7. Kebijakan pemerintah. Keterbatasan dukungan pemerintah, khususnya terkait penyediaan pupuk dan berbagai kebijakan pendukung lainnya, turut memengaruhi keberlanjutan industri gula merah.

4.3.2 Pengembangan Koperasi Gula Merah

Berdasarkan hasil analisis SWOT, industri gula merah memiliki sejumlah kekuatan internal, yaitu pengalaman usaha yang panjang, pasar yang relatif stabil, ketersediaan bahan baku yang melimpah, serta mulai diterapkannya mekanisasi dalam proses produksi. Sementara itu, kelemahan utama yang dihadapi meliputi rendahnya tingkat pendidikan pelaku usaha, fluktuasi kualitas bahan baku, lemahnya kemampuan manajerial, belum dimilikinya legalitas usaha secara lengkap, serta keterbatasan modal.

Di sisi eksternal, peluang yang dimiliki industri gula merah meliputi luasnya pangsa pasar dan peluang peningkatan kualitas bahan baku melalui inovasi budidaya maupun teknologi pengolahan. Namun demikian, terdapat sejumlah ancaman yang harus diantisipasi, antara lain lambatnya proses perizinan usaha, meningkatnya persaingan produk sejenis, kelangkaan pupuk, kesenjangan sosial di masyarakat, serta fluktuasi permintaan pasar.

Hasil analisis SWOT tersebut menunjukkan bahwa strategi pengembangan industri gula merah perlu difokuskan pada penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan kualitas manajemen usaha, penguatan kelembagaan koperasi, peningkatan akses pembiayaan, serta pengembangan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan klaster menjadi salah satu strategi yang potensial karena mampu mengintegrasikan seluruh pelaku dalam rantai nilai industri gula merah sehingga tercipta efisiensi kolektif dan peningkatan daya saing usaha secara berkelanjutan.

5. KESIMPULAN

Rekomendasi kebijakan yang harus dilaksanakan oleh dewan pemerintahan desa di Kecamatan Kandat dan Ngadiluwih adalah: 1) memfasilitasi upaya pengembangan lembaga koperasi melalui ketersediaan fasilitas; 2) memberikan sosialisasi kepada masyarakat khususnya yang terlibat dalam usaha ekonomi gula merah di tingkat lokal; 3) untuk memfasilitasi dukungan kelembagaan dengan menjadi pelatih atau penasihat lembaga koperasi yang dikembangkan; 4) pemerintah kecamatan untuk memfasilitasi kemudahan perizinan, akses fasilitas dalam pemasaran, kerjasama fasilitas bisnis dengan perusahaan ekonomi lainnya melalui pameran dan kunjungan kerja.

Bagi Pemerintah Kota Kediri, jajaran Pemerintah Kota Kediri terkait seperti Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Dinas Tenaga Kerja, Bappeda dan yang relevan lainnya harus memfasilitasi kebijakan yang mampu mendukung pengembangan klaster, antara lain: 1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan memfasilitasi kebijakan fasilitas tersebut bekerja sama dengan pelaku ekonomi lain untuk meningkatkan kapasitas produksi; 2) Dinas Koperasi menyediakan fasilitas perizinan, bimbingan dan bantuan; 3) Dinas Tenaga Kerja harus memfasilitasi upaya untuk meningkatkan keterampilan pekerja dan peningkatan manajemen bisnis untuk pemilik bisnis serta SDMnya; 4) Bappeda Kediri perlu memberikan penekanan kebijakan pada tata ruang dan pemanfaatan ruang usaha.

Bahwa, rekomendasi kebijakan untuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur:

1. Memberikan dukungan kepada pemerintah Kabupaten Kediri untuk mengembangkan kapasitas bisnis ekonomi dan kapasitas kelembagaan koperasi dengan kebijakan yang sinergis;
2. Dinas Koperasi dan UKM di Jawa Timur, klaster ekonomi gula merah adalah potensi besar untuk pengembangan koperasi secara profesional baik pengembangan ekonomi dan kelembagaan mereka;
3. dukungan kelembagaan untuk mendorong terciptanya pengelolaan yang handal, keanggotaan produktif, kompetitif, dan manajemen bisnis profesional.
4. Terakhir untuk rekomendasi kebijakan Pemerintah Pusat yang dapat dilakukan adalah memberikan peraturan yang mendukung pengembangan dan pemberdayaan UKM dan koperasi kompetitif dan profesional melalui kebijakan afirmatif untuk mendukung peningkatan kapasitas UKM dan koperasi dalam persaingan di tingkat global.

DAFTAR PUSTAKA

1. Perdagangan K. Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. 25 Indonesia; 2011.
2. Perdagangan K. Undang-Undang No. 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil. 9 1995.
3. UKM KNK dan. Pembinaan Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Kelembagaan Koperasi. Jakarta; 2007.
4. Munkner HH. Hukum Koperasi. Bandung: Alumni Bandung; 1982.
5. Nation U. Guidance on Good Practices in Corporate Governance Disclosure. New York: Geneva; 2006.

6. Birchall J. Co-operative Principles Ten Years On. ICA Gen Assem. 2005;2(98):45–63.
7. Indonesia R. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor: 4 Tahun 1994, Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Pembubaran Anggaran Dasar Koperasi. Jakarta; 2007.
8. Indonesia R. Peraturan Menteri Nomor 22 tahun 2007 Tentang Pedoman Pemeringkatan Koperasi. 22/PER/M.KUKM/IV/2007.
9. Soedjono I. Jatidiri Koperasi Nilai Ekonomi Islam untuk Keadilan Ekoonomi. Jakarta: LSP21; 2003.
10. Sudjarmono J. be G2C. Jakarta: Elexindo Media; 2004.
11. Becattini, G. (1990). **The Marshallian Industrial District as a Socio-Economic Notion**. In F. Pyke, G. Becattini, W. Sengenberger (Eds.), **Industrial Districts and Inter-firm Co-operation in Italy**. Geneva: ILO.
12. Fukuyama, F. (1995). **Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity**. New York: Free Press.
13. Hanel, A. (2005). **Organisasi Koperasi: Pokok-pokok Pikiran Mengenai Organisasi Koperasi dan Kebijakan Pengembangannya di Negara Berkembang**. Yogyakarta: Graha Ilmu.
14. Marshall, A. (1920). **Principles of Economics** (8th ed.). London: Macmillan.
15. Porter, M. E. (1998). **On Competition**. Boston: Harvard Business School Press.
16. Putnam, R. D. (1993). **Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy**. Princeton: Princeton University Press.
17. Schmitz, H. (1995). **Collective Efficiency: Growth Path for Small-Scale Industry**. **Journal of Development Studies**, 31(4), 529–566.
18. Suryana. (2014). **Kewirausahaan: Pedoman Praktis**. Jakarta: Salemba Empat.
19. Tambunan, T. (2009). **UMKM di Indonesia**. Jakarta: Ghalia Indonesia.
20. Tambunan, T. (2019). **The Performance of Indonesian SMEs During Economic Crises**. **Journal of Small Business and Entrepreneurship Development**, 7(2), 25–37.
21. UNIDO. (2001). **Development of Clusters and Networks of SMEs**. Vienna: United Nations Industrial Development Organization.